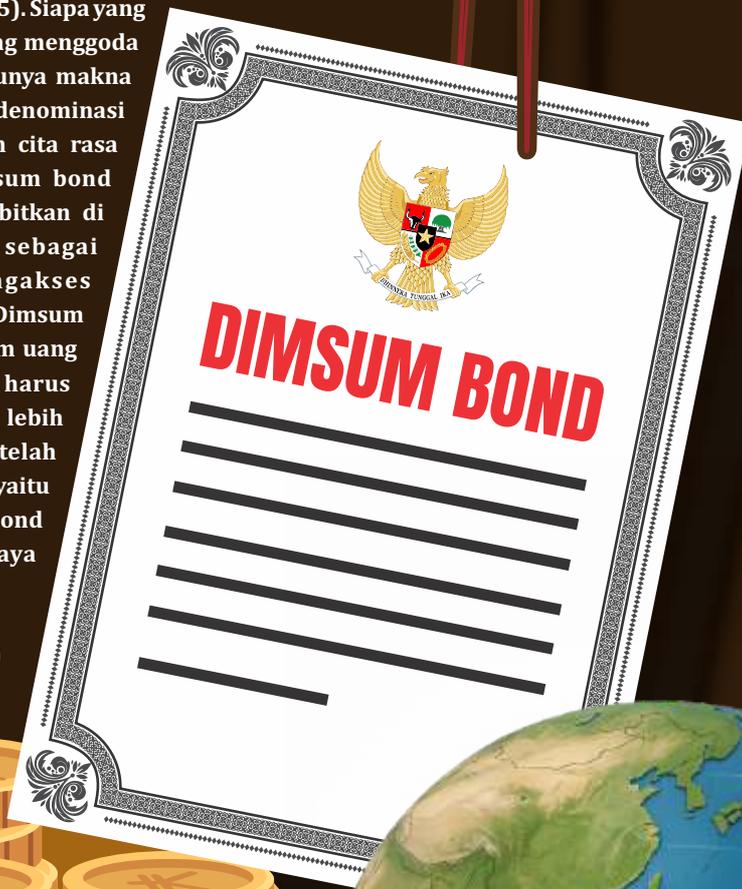


DIMSUM BOND “MENU BARU” PEMBIAYAAN PEMERINTAH

Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan surat utang berdenominasi renminbi atau Dimsum Bond sebagai “menu baru” di pasar internasional. Penerbitan perdana Dim Sum Bond telah masuk daftar antrean berikutnya setelah Kangaroo Bond berhasil diterbitkan secara perdana pada 7 Agustus 2025. Dikutip Minggu (24/8/2025). Siapa yang tak kenal dengan “dimsum”? Kudapan kecil khas Tiongkok yang menggoda selera. Namun, di dunia keuangan internasional, istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Dimsum bond adalah “menu” investasi berdenominasi yuan yang disajikan di luar daratan Tiongkok, menawarkan cita rasa peluang baru bagi negara dan pelaku pasar global. Dimsum bond merupakan instrumen keuangan berupa obligasi yang diterbitkan di Hongkong dan menggunakan renminbi offshore (CNH) sebagai denominasi, sehingga memudahkan perusahaan mengakses pembiayaan dalam mata uang Tiongkok di luar pasar daratan. Dimsum bond dibuat supaya perusahaan dari mana saja bisa meminjam uang dari investor internasional dalam mata uang yuan, tanpa harus terbitkan obligasi di pasar Tiongkok daratan yang aturannya lebih kompleks. Rencana penerbitan menu Dimsum bond ini setelah pemerintah Indonesia menerbitkan 3 surat utang non-dolar AS, yaitu samurai bond, euro bond dan yang terbaru adalah kangaroo bond yang dinilai laris manis. Langkah ini mencerminkan upaya diversifikasi sumber pembiayaan sekaligus basis investor.

[BACA HAL 11...](#)

PEMERINTAH AKAN SIAPKAN PERPRES BP HAJI

Pemerintah siap menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Artinya ke depan kemungkinan akan ada perubahan status Badan Penyelenggaraan (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru mengenai Badan Penyelenggara (BP) Haji jika nantinya RUU sudah disahkan.

"Pasti," kata Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, singkat saat ditanya mengenai penerbitan perpres baru mengenai BP Haji.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga berharap jika nantinya RUU Haji itu disahkan maka pelaksanaan haji semakin baik ke depannya.

"Harapannya jelas hanya satu, pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi," kata Prasetyo saat ditemui pada sela-sela kegiatannya mengikuti Merdeka Run 8.0 K di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Ketika disinggung adanya kemungkinan RUU haji dan umroh disahkan Selasa depan, dia memberikan respon singkat. "Sedang dimatangkan di DPR," katanya dikutip antara.

Anggota Komisi VIII sekaligus anggota Panja RUU Haji dan Umrah, Selly Andriany Gantina, mengatakan dengan demikian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang saat ini berada di Kementerian Agama bakal disesuaikan.

"Otomatis maka nanti akan ada penyesuaian, karena pada saat hari ini Kementerian Haji dan Umrah itu kan sudah berdiri sendiri, maka di Kementerian Agama otomatis harus dilepas. Sudah tidak ada lagi yang menyangkut dengan namanya Dirjen PHU," ujar Selly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Selly menyatakan terhadap penyesuaian tersebut akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Kementerian Agama.

"Apakah nanti ada peleburan di direktorat tertentu atau kemungkinan lain," tutur Selly.

"Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah sumber daya manusia dan aset-aset yang ada di Kementerian Agama itu nanti akan ditarik di Kementerian Haji dan Umroh," sambungnya.

Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Haji menjadi Undang-undang rampung pada Selasa (26/8/2025) besok. Hal itu disebabkan persiapan proses pelaksanaan haji oleh otoritas Arab Saudi telah dimulai.

"Karena bagaimanapun juga pelaksanaan ibadah haji 2026 harus sudah sesegera mungkin dilaksanakan, তাহা পূর্ন penyelenggaraan bahkan sudah dimulai dari tanggal 23 Agustus, karena kita kemarin sudah menyetujui untuk pembayaran DP uang muka, karena seperti yang diharapkan oleh pemerintah Saudi Arabia, kalau kita tidak memberikan DP maka alokasi untuk Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) pemerintah Indonesia tidak akan diberikan," ungkap Selly.

Dilansir dari detikcom, Minggu (24/8/2025), berikut beberapa poin krusial:

1. Transformasi BP Haji Jadi Kementerian

Pada Jumat (22/8/2025), panja Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menyepakati penambahan Pasal 21-23 dalam RUU Haji terkait kementerian yang mengurus haji dan umrah. Mereka juga menyepakati perubahan penyebutan kepala badan menjadi menteri.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan pasal pemisahan kewenangan telah disetujui. Dia berharap tak ada



Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi

tumpang tindih kewenangan ke depannya.

"Dan tadi sepertinya sudah disepakati bunyi pasalnya sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih. Dan itu bisa di klaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama yang, ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu," kata Marwan ditemui terpisah.

sementara umur haji yang ada itu 17 tahun. Sementara kalau berdasarkan syariah itu, orang mimpi (mimpi basah) orang mimpi itu kurang lebih umur 12 atau 13 tahun gitu," kata Ansory dalam rapat Panja RUU Haji di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang kemudian menanggapi jika memang ada hal-hal darurat perlu diubah. Marwan menyebut ada usulan usia minimal 9 tahun. Ini masih akan dibahas bersama anggota panja.

"Umur akil balig itu 9 tahun karena perempuan ada yang 9 tahun. Jadi 9 tahun sudah boleh berangkat haji, nanti kita sepakati," kata legislator PKB ini. (han,ist/lut)



Harapannya jelas hanya satu, pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi,"

PRASETYO HADI
Menteri Sekretaris Negara

2. Petugas Haji Bisa Nonmuslim

Pada rapat yang sama, panja DPR dan pemerintah menyepakati panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) tak harus beragama Islam. Ketentuan ini untuk petugas embarkasi atau daerah minoritas di RI, bukan PPIH Arab Saudi.

3. Kuota Haji Kabupaten/Kota Ditetapkan Menteri

Penetapan kuota haji reguler di daerah juga masuk DIM yang dibahas panja. Untuk alokasi kuota jemaah reguler di tingkat kabupaten/kota, panja sepakat pembagiannya diatur oleh menteri. Hal ini mengubah aturan sebelumnya yang diputuskan oleh gubernur.

4. Usulan Perubahan Syarat Minimal Usia Jemaah Haji

Batas usia minimal jemaah haji juga menjadi sorotan dalam pembahasan RUU Haji dan Umrah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengusulkan perubahan syarat minimal usia.

"Jadi ada UU haji ini dilaksanakan satu pasal berlandaskan syariah,

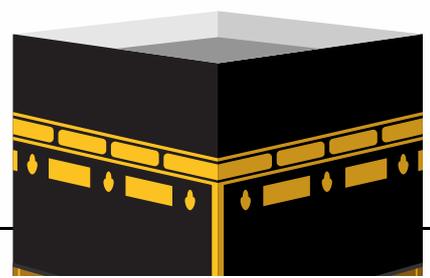
USULAN LAIN DALAM DIM

1. Ketentuan Umrah Mandiri

Juru Bicara 13 Asosiasi Haji dan Umrah Firman M Nur mengatakan pihaknya menolak legalisasi umrah mandiri dalam RUU Haji dan Umrah. Mereka menilai umrah mandiri minim perlindungan jemaah dan merugikan ekonomi umat.

2. Alokasi Kuota Haji Khusus

Asosiasi juga mengeluhkan soal alokasi kuota haji khusus maksimal 8 persen. Diketahui, dalam rapat paripurna pada 24 Juli lalu, Fraksi PKS secara eksplisit menyatakan dukungannya untuk legalisasi umrah mandiri dan usulan kuota haji khusus paling tinggi 8 persen. (han,ist/lut)





Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafarez.

RUU KUHAP PERLU MASUKKAN RESTORATIVE JUSTICE DAN PLEA BARGAINING

Komisi III DPR RI menilai revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memuat mekanisme penyelesaian perkara yang lebih modern. Ada dua hal penting yang perlu diperkuat, yakni restorative justice atau RJ dan plea bargaining.

Plea bargaining merupakan praktik negosiasi dalam sistem hukum pidana antara jaksa penuntut umum dan terdakwa (atau pembelanya), di mana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas suatu pelanggaran dengan imbalan hukuman yang lebih ringan atau dakwaan yang lebih ringan. Sistem ini bertujuan mempercepat proses peradilan dan menjamin kepastian bersalah, dengan kesepakatan tersebut harus disahkan oleh hakim untuk memastikan prosesnya sukarela dan adil.

Sedangkan, Restorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat melalui dialog dan mediasi, bukan hanya pada pembalasan atau pemidanaan formal. Tujuannya adalah agar pelaku bertanggung jawab, korban mendapatkan pemulihan, dan masyarakat dapat kembali pada keadaan semula, yang difasilitasi oleh pihak netral.

Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafarez, mengatakan kedua mekanisme itu bisa menjadi opsi untuk mengurangi beban persidangan serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada masyarakat.

"Ke depan kita ingin mengurangi orang masuk persidangan. Restorative justice bisa jadi jalan, dan plea bargaining bisa menjadi opsi lain bagi aparat penegak hukum agar proses lebih sederhana dan memberikan kepastian," kata Gilang dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (22/8/2025).

Gilang menjelaskan, dalam kunjungan kerja tersebut Komisi III DPR RI mendengarkan masukan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga BNN. Semua pihak diminta

memberi pandangan agar UU KUHAP baru bisa disusun secara komprehensif dan aplikatif.

Ia menekankan, sinergi antar-aparat penegak hukum sangat diperlukan agar UU KUHAP baru tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga harmonis dalam praktik. "Yang paling

penting adalah kerjasama APH di lapangan. Dengan begitu, masyarakatlah yang akan mendapat manfaat terbesar UU KUHAP baru ini," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono menegaskan bahwa penerapan restorative justice sangat penting dimasukkan dalam Rancangan UU KUHAP yang baru. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi atas persoalan kelebihan kapasitas (overcapacity) yang terjadi hampir di seluruh lapas di Indonesia.

"Tidak semua perkara pidana harus diselesaikan dengan tuntutan berat. Ada kasus ringan seperti salah ucap yang dipidanakan (karena melakukan pencemaran nama baik. Itu sebenarnya bisa dimitigasi sejak awal secara kekeluargaan," ujar Bimantoro usai pertemuan di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (22/08/2025)

Ia menjelaskan bahwa RCUHAP baru memberikan penguatan terhadap hak-hak warga negara, salah

satunya melalui pendampingan hukum sejak tahap awal, bahkan ketika seseorang masih berstatus saksi.

"Kita ingin menyeimbangkan kekuatan negara dengan kekuatan rakyat. Dulu negara lebih dominan. Sekarang ada hak pendampingan pengacara sejak awal, agar tidak ada lagi pasal selundupan atau kasus yang dipaksakan," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Bimantoro menegaskan, RCUHAP justru berpihak pada masyarakat sipil. "Saya juga masyarakat biasa. Jadi penting bagi saya memastikan hak warga negara benar-benar sama di mata hukum," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan

R U U K U H A P membawa sejumlah terobosan penting yang dinilai lebih humanis dan menekankan pemulihan, bukan sekedar penghukuman. Salah satu terobosan yang disorot adalah restorative justice.

Dia mengatakan pendekatan ini memungkinkan korban, pelaku, dan keluarga duduk bersama untuk mencari solusi pemulihan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi. "Konsep ini dinilai relevan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan mempercepat penyelesaian perkara," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Selain itu, R U U K U H A P juga mengatur beberapa mekanisme baru, yaitu: Pertama, Plea

Bargaining, di mana terdakwa yang mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif bisa mendapat keringanan hukuman.

Kedua, Deferred Prosecution Agreement, yaitu penundaan penuntutan terhadap pelaku korporasi dengan syarat tertentu.

Ketiga, Putusan Pemaafan Hakim,

yaitu hakim berwenang menyatakan terdakwa bersalah, tetapi tidak menjatuhkan hukuman bila perbuatan dianggap ringan dan demi pertimbangan keadilan serta kemanusiaan.

"Tak hanya itu, pengaturan mengenai rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi korban juga dipertegas, termasuk dukungan terhadap penyandang disabilitas dalam proses hukum," urainya.

Dengan hadirnya mekanisme ini, KUHAP baru diharapkan mampu mencerminkan paradigma baru hukum pidana, yang tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga pemulihan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Selain itu, Rudianto Lallo juga mengatakan bahwa dalam R U U K U H A P itu memasukkan penyadapan sebagai bagian dari hukum acara pidana, namun teknis pelaksanaannya diatur khusus dalam undang-undang tersendiri demi mencegah penyalahgunaan.

"Selain itu, terdapat ketentuan baru mengenai pemblokiran aset dan akun digital untuk mencegah pengalihan harta, transaksi perbankan, hingga aktivitas daring terkait tindak pidana," jelas Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo dalam pertemuan tersebut.

Dari sisi prosedur, prosedur penangkapan akan diatur lebih tegas, yaitu hanya boleh dilakukan maksimal 1x24 jam. Sementara itu mekanisme penahanan, penggeledahan, dan penyitaan diperbaiki agar lebih akuntabel. "Pemeriksaan pun bisa direkam menggunakan kamera pengawas demi transparansi," ujarnya.

Hak-hak pihak yang berperkara juga diperkuat. Bahwa tersangka dan saksi berhak segera didampingi advokat sejak dimulainya tahapan penyidikan. Advokat mendapat jaminan hak imunitas serta akses penuh dalam mendampingi klien. Di sisi lain, korban, penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia juga memperoleh perlindungan lebih besar.

Tak kalah penting, R U U K U H A P mengakui alat bukti elektronik dalam persidangan dan membuka jalan bagi sistem peradilan pidana berbasis teknologi. Dengan begitu, proses hukum di Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus menjamin akuntabilitas. (han,rls/lut)



Ke depan kita ingin mengurangi orang masuk persidangan. Restorative justice bisa jadi jalan, dan plea bargaining bisa menjadi opsi lain bagi aparat penegak hukum agar proses lebih sederhana dan memberikan kepastian,"

GILANG DHIELAFARREZ
Anggota Komisi III DPR RI

BERSIAP! PEMERINTAH BERSIKUKUH NAIKKAN IURAN BPJS KESEHATAN DI 2026

Mulai tahun depan, pemerintah bersikukuh akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini sudah dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan utama peningkatan iuran BPJS adalah untuk melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menambah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Sustainability dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung pada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak biayanya semakin besar," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, dikutip Minggu (24/8/2025).

Menurutnya, keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari APBN.

"Waktu keputusan menaikkan tarif BPJS memutuskan PBI dinaikkan

artinya dari APBN tapi yang di mandiri ga dinaikkan maka memberikan subsidi sebagian. Dari mandiri itu masih di Rp 35 ribu seharusnya Rp 42ribu jadi Rp7 ribu nya dibayar pemerintah terutama PBPB," ujarnya.

Adapun dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 244 triliun, sebesar Rp123,2 triliun disiapkan untuk layanan kesehatan masyarakat. Porsi terbesar dialokasikan bagi subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) serta 49,6 juta peserta PBPB, dengan total anggaran mencapai Rp69 triliun.

Sri Mulyani menegaskan, pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian iuran masih akan dilakukan oleh beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. "Kami akan prosesnya membahas dengan Menteri Kesehatan dan BPKS kesehatan karena itu lembaga yang memandatkan untuk membahas," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan peningkatan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini, setelah lima tahun terakhir sejak 2020 tidak mengalami kenaikan. Padahal, belanja kesehatan masyarakat kata dia terus naik dari tahun ke tahun dengan kisaran 15%.

"Sama saja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita gak naik 5 tahun padahal inflasi 15% kan enggak mungkin," ucap Budi di DPR, pada Februari lalu.

Menurut Budi, belanja kesehatan masyarakat saat ini pun kenaikannya telah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun.

Budi menegaskan, kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir itu tidak sehat. "Kita hati-hati bapak ibu bahwa pertumbuhan belanja nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain bapak ibu," ungkap Budi.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi membenarkan bahwa pemerintah berencana untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada 2026. "Bila wacana ini jadi diterapkan, jangan sampai berdampak terhadap subsidi bagi masyarakat. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya hanya karena hitung-hitungan fiskal," ujar Nurhadi.

Nurhadi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif iuran BPJS secara serentak, tetapi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi fiskal negara.

Meski begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada keberlanjutan akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. "Kesehatan adalah hak dasar warga negara, bukan komoditas. Karena itu, kebijakan pembiayaan tidak boleh sampai menutup akses masyarakat terhadap JKN," kata Nurhadi. (wid,rls,ant/dya)

21 JENIS PENYAKIT YANG TIDAK DITANGGUNG BPJS KESEHATAN

- Wabah/KLB
- Estetika (operasi plastik, dll.)
- Ortodontik (behel, dll.)
- Akibat tindak pidana (penganiayaan, kekerasan seksual, dll.)
- Cedera akibat menyakiti diri/ percobaan bunuh diri
- Akibat alkohol/obat terlarang
- Infertilitas/mandul
- Cedera akibat tawuran/kejadian yang tak dapat dicegah
- Layanan kesehatan di luar negeri
- Tindakan medis percobaan/ eksperimen
- Pengobatan alternatif/tradisional yang belum terbukti
- Alat kontrasepsi
- Perbekalan kesehatan rumah tangga
- Layanan tidak sesuai aturan/ rujukan atas permintaan sendiri
- Layanan di fasilitas nonkerja sama BPJS (kecuali darurat)
- Kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (sudah dijamin program lain)
- Kecelakaan lalu lintas (ditanggung program Jasa Raharja sampai batas hak peserta)
- Layanan khusus TNI/Polri/Kemenhan
- Layanan yang sudah ditanggung program lain
- Layanan bakti sosial
- Layanan di luar manfaat jaminan kesehatan

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan



GADUH KETUA IDAI TAK LAGI BISA LAYANI PASIEN BPJS DI RSCM

GADUH terjadi dalam pelayanan BPJS Kesehatan saat dokter subspecialis jantung anak, Piprim Basarah Yanuarso, mengumumkan tak bisa melayani pasien. Piprim menyebut hal tersebut merupakan konsekuensi dari penolakannya terhadap mutasi yang dinilai tidak prosedural dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kemenkes menepisnya dan mengatakan Piprim memangsudahi dimutasi ke Rumah Sakit Umum

Pusat Fatmawati Jakarta sejak April 2025. Karena itu, dia tak bisa lagi melayani pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

"Masyarakat yang selama ini sudah menjadi pasien dokter Piprim, masih tetap bisa mendapatkan pe-layanannya di RS Fatmawati dengan berbagai skema pembiayaan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman,

Minggu (24/8/2025).

Skema pembiayaan tersebut, menurut Aji tetap beragam. Mulai dari baik pembayaran langsung secara mandiri, asuransi swasta, hingga Jaminan Kesehatan Nasional maupun BPJS Kesehatan.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso sebelumnya mengumumkan tak lagi bisa melayani pasien peserta BPJS Kesehatan di RSCM Jakarta. Piprim menyebut keputusan tersebut merupakan konsekuensi dari penolakannya terhadap mutasi yang dinilai tidak prosedural dari Kementerian Kesehatan.

"Dengan berat hati saya mengumumkan mulai hari ini tidak bisa lagi melayani putra-putri bapak ibu yang sakit jantung di RSCM, baik di PJT maupun Kiara," kata Piprim dalam unggahan Instagram pribadinya, @dr.piprim, Jumat, 22 Agustus 2025. (wid,tmo,ist/dya)



(Ilustrasi) Harga beras premium melonjak tajam di atas HET, tembus Rp 140.790 per kemasan 5 kilogram. (Ist)

SAAT MENTAN AMRAN DITUDING TAK PEDULI HARGA BERAS NAIK

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membantah tuduhan bahwa dirinya tidak peduli terhadap kenaikan harga beras di Indonesia. Ia menegaskan, informasi tersebut hanyalah framing yang sengaja dibuat pihak tertentu. Menurut pantauan di pasar, harga beras premium memang melonjak tajam hingga tembus Rp 140.790 per kemasan 5 kilogram.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus berupaya mengatasi lonjakan harga beras yang terjadi belakangan ini.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Perlu kami sampaikan, informasi yang beredar di-framing, sengaja di-framing bahwa kami tidak peduli terhadap naiknya harga beras," kata Amran dalam pernyataannya, dikutip Minggu (24/8/2025).

Amran menekankan pemerintah justru bekerja keras sejak awal dengan menggelar operasi pasar bersama Perum Bulog. Total sebanyak 1,3 juta ton beras disalurkan ke masyarakat dengan harga Rp12.500 per kilogram (kg).

"Itu bentuk kepedulian dan itu atas perintah Bapak Presiden," ujarnya.

Tak hanya fokus pada konsumen, Amran menegaskan kepedulian pemerintah juga diarahkan ke petani. Salah satunya dengan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi Rp6.500 per kg.

"Alhamdulillah, hasilnya hari ini yang kita syukuri adalah, bahwa NTP (Nilai Tukar Petani), kesejahteraan petani meningkat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebagai anak bangsa, kita tidak impor lagi. Sekarang stok kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri," jelas dia.

Bandingkan dengan Jepang

Amran juga menyinggung kembali pernyataannya soal perbandingan harga beras di Jepang yang sempat menuai kritik. Menurutnya, maksud dari pernyataan itu adalah agar masyarakat tetap bersyukur, sembari memastikan pemerintah terus bekerja keras menurunkan harga.

"Adapun kami menyebut bahwa Jepang itu kenaikan harga beras cukup tinggi. Artinya, kita patut bersyukur, tetapi kami mewakili pemerintah

harus bekerja keras menurunkan harga, dan juga hasilnya hari ini sudah 13 provinsi harga sudah turun. Kami yakin ke depan semakin turun. Kenapa? Operasi pasar kami lanjutkan terus menerus," kata Amran.

Ia pun menegaskan keberpihakannya kepada rakyat, baik petani maupun konsumen. "Saudaraku, bukti nyata satu lagi, bahwa kami sangat peduli dengan kenaikan harga beras, dan peduli pada konsumen. Kami pertaruhkan segalanya demi konsumen, demi

petani Indonesia, adalah yang mencurangi petani baru-baru ini, yaitu para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, kami berani berhadapan demi konsumen, demi rakyat Indonesia," ungkapnya.

Amran meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan langkah pemerintah menekan harga pangan.

"Jadi jangan mudah terprovokasi oleh framing orang tertentu, yang tidak senang dengan kami. Kami tahu banyak yang tidak senang, banyak yang mengganggu bisnisnya, karena kami melakukan hal ini. Tapi semua kami lakukan demi rakyat Indonesia," tandas dia.

Sebelumnya, Amran menuai kritik usai pernyataannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. Saat itu, ia menyebut masyarakat terlalu reaktif terhadap kenaikan harga beras di dalam negeri yang relatif kecil dibandingkan Jepang.

"Sekarang ini baru naik sedikit saja ribut. Jepang sudah Rp100 ribu per kg harga beras hari ini," ujar Amran, Kamis (21/8/2025).

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek

Soeharto lantas mengingatkan bahwa perbandingan tersebut tidak relevan, sebab perbedaan pendapatan per kapita antara Indonesia dan Jepang cukup jauh.

"Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Pendapatan per kapita kita juga sudah lain, Pak," kata Titiek.

REALISASI 2025

Per 22 Agustus 2025, total penyaluran beras SPHP mencapai sekitar 239,5 ribu ton

Rincian

- Tahap Januari-Februari: 181,1 ribu ton (dengan 100,9 ribu ton di awal tahun dan 80,2 ribu ton saat Idul Fitri)
- Tahap Juli-Agustus (setelah panen raya): sekitar 58,4 ribu ton

Catatan: Semula ditargetkan penyaluran sepanjang tahun 2025 mencapai 1,5 juta ton, namun disesuaikan menjadi 1,3 juta ton setelah menghentikan sementara saat panen raya

DATA PENYALURAN BERAS SPHP (2024)

Target

1.4 Juta Ton

Realisasi

1.401 Juta Ton

Persentase Capaian

100.12 Persen

Berbagai sumber diolah

Bapanas Pastikan Stok Aman Sampai Akhir 2025

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok beras nasional akan aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2025. Proyeksi ini didasarkan pada perhitungan neraca pangan yang menunjukkan produksi beras nasional akan melebihi konsumsi.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa produksi beras diproyeksikan mencapai 31,37 juta ton, sementara konsumsi hanya sekitar 30,97 juta ton. Dengan penambahan stok awal tahun sebesar 8,4 juta ton dan impor beras khusus 532 ribu ton, total ketersediaan beras bisa mencapai 40,31 juta ton. Hal ini menyisakan neraca beras akhir tahun sebesar 9,33 juta ton.

"Neraca beras akhir tahun 2025 dapat sebesar 9,33 juta ton," kata Arief dikutip dari keterangan persnya, Minggu (24/8/2025). Meski demikian, Arief menekankan bahwa angka produksi tersebut masih

bersifat proyeksi dan sangat bergantung pada capaian tanam dan panen hingga akhir tahun.

"Jadi seperti yang disampaikan Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) dalam beberapa kesempatan, apabila kita menanam 1 juta hektare setiap bulannya, maka produksi beras bisa 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan, itu akan tercapai," ungkap Arief.

Di sisi lain, Bapanas mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurut Arief, adanya penguatan anggaran dalam RAPBN 2026 akan mempermudah pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tahun depan.

"Jadi tahun depan itu kita tidak mengajukan-mengajukan lagi, tapi sudah masuk anggarannya dan kita bisa langsung mengeksekusi

kapanpun kita perlukan, karena tidak semua daerah itu panen," jelas Arief.

Dia menambahkan, pengalokasian anggaran ini sangat penting untuk daerah-daerah yang memiliki masa panen tidak menentu, seperti Papua. Total anggaran yang dialokasikan di sektor pangan adalah Rp 164,4 triliun, di mana Rp 6,4 triliun di antaranya untuk konsumsi.

Dengan adanya anggaran yang sudah tersedia di RAPBN 2026, Bapanas tidak lagi harus menunggu transfer anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) seperti yang terjadi pada tahun ini. Hal itu akan memungkinkan Bapanas untuk bertindak lebih cepat dalam menstabilkan harga dan pasokan, terutama di daerah yang membutuhkan. (wid,ves,rls/dya)

RANPERDA PENGELOLAAN MAKAM KOTA BATU

DPRD: ASPEK LINGKUNGAN-SUBSIDI SILANG MASUK POIN PENTING

BATU - Aspek lingkungan hingga skema subsidi silang menjadi poin penting yang dipertimbangkan dalam pembahasan Ranperda Pengelolaan Makam Kota Batu. DPRD berharap, regulasi tidak hanya menata sistem pemakaman lebih tertib, tapi juga menjamin akses yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

"Tentunya kami mendukung rencana untuk menciptakan pengelolaan makam-makam yang ada di Kota Batu. Baik yang muslim atau non-muslim, yang lebih teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun ada beberapa catatan dan usulan DPRD yang harus masuk dalam payung hukum ini," ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso, dikutip pada Minggu (24/8/2025).

Untuk diketahui, ranperda tersebut merupakan usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperum) dan saat ini tengah dibahas bersama legislatif.

Punjul menegaskan, salah satu usulan DPRD adalah agar Pemkot Batu memperhatikan aspek lingkungan

hidup dalam pembangunan dan pengelolaan lahan pemakaman.

Penerapan sistem pengelolaan sampah organik yang terintegrasi dengan area pemakaman, disebutnya dapat memberikan manfaat ekologis dan mengurangi dampak lingkungan.

Ditambahkannya, peran aktif masyarakat juga perlu dilibatkan dalam penataan dan perawatan makam, khususnya di tingkat kelurahan. Menurutnya, partisipasi warga akan membantu mengurangi beban pemerintah sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kelestarian lingkungan sekitar.

Selain lingkungan, Punjul juga menilai penting adanya keadilan akses bagi masyarakat dalam pelayanan pemakaman. Skema subsidi silang diusulkan agar keluarga yang kesulitan biaya tetap mendapatkan layanan pemakaman yang layak sesuai dengan keyakinan masing-masing.

"Dengan Perda ini, fraksi-fraksi DPRD Kota Batu mendorong agar pelayanan pemakaman di Kota Batu lebih terjangkau dan mudah diakses.

Untuk itu kami mengusulkan adanya skema subsidi silang dan standar biaya yang transparan," jelas Punjul.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menekankan, ranperda juga harus mengantisipasi masalah sosial akibat keterbatasan lahan pemakaman. Menurutnya, salah satu solusi jangka panjang yang perlu dikaji adalah pemakaman vertikal serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan makam.

Punjul menuturkan, lahan pemakaman di Kota Batu semakin terbatas seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan perumahan. Karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar pengelolaan makam berjalan tertib, adil, serta sesuai norma agama dan sosial.



(Ilustrasi) Sistem pemakaman di Kota Batu diharapkan menjamin keadilan dan berkelanjutan.(dok)

Punjul juga menambahkan, pengembang perumahan wajib menyediakan fasilitas umum, termasuk tanah makam. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme serah terima, standar kualitas, dan sanksi tegas agar kewajiban tersebut tidak sekadar formalitas. (Santi/Dya)

USULAN 112 FORMASI PPPK PARUH WAKTU KOTA MALANG MAYORITAS TENAGA TEKNIS



Plt Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusulkan 112 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, formasi terbesar dialokasikan untuk tenaga teknis dengan total 98 orang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru

Martono, menyampaikan usulan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah serta kemampuan anggaran daerah.

"Untuk PPPK Paruh Waktu, kami mengusulkan sebanyak 112 orang. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, juga dengan kemampuan anggaran. Rinciannya guru ada 12 orang, kemudian tenaga kesehatan 2, dan 98 sisanya teknis," ujarnya, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (24/8/2025).

Untuk diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengungkapkan masih ada sekitar 200 guru yang berstatus sebagai honorer. Suwarjana mengaku akan mengusulkan keseluruhan jumlah tersebut untuk menjadi PPPK paruh waktu.

Namun menurut Hendru, ketetapan jumlah formasi PPPK paruh waktu yang ada saat ini tidak mampu untuk mengakomodir seluruh usulan. Dikatakannya, putusan ini dibuat berdasarkan ketentuan dalam surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Dengan demikian, lanjutnya, seluruh tenaga non-ASN di Kota Malang yang memenuhi syarat sudah masuk dalam daftar pengusulan.

Dalam kesempatannya ini, Hendru menegaskan tidak semua tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Hal ini bergantung pada sumber anggaran yang membiayai gaji pegawai non-ASN tersebut.

Bagi tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam formasi PPPK paruh waktu, Hendru menyebut, Pemkot Malang telah menyiapkan skema redistribusi pegawai, baik antar perangkat daerah maupun internal. Langkah ini diambil untuk menjamin tidak ada kekosongan tenaga kerja, baik di bidang teknis, pendidikan, maupun kesehatan.

"Kita sudah punya edaran dari Sekda untuk redistribusi," tambah Hendru.

Lebih lanjut, Hendru menjelaskan keberadaan PPPK paruh waktu merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang tidak tersedia formasi PPPK penuh waktu. "Gaji mengikuti dengan gaji honor sekarang. Mereka tidak masuk belanja pegawai," terangnya.

Saat ini, menurutnya gaji tenaga honorer di Kota Malang telah menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR), dengan nominal tertinggi mencapai Rp3,5 juta per bulan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PPPK paruh waktu.

Namun Hendru menekankan, meski secara teknis mirip dengan tenaga honorer, PPPK paruh waktu memiliki status hukum yang lebih jelas. Status ini sah secara hukum dan setiap pegawai akan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).

"Tetap legal dan sudah sah. Prosesnya sama dengan PPPK, nanti informasinya juga ada NIP," katanya. (Santi/Dya)

PLTN RUSIA JADI SASARAN, TERMINAL UST-LUGA TERBAKAR

Ukraina menyerang Rusia dengan drone pada Minggu (24/8/2025), menyebabkan kapasitas reaktor di salah satu PLTN terbesar Rusia turun drastis serta menyalakan kebakaran besar di terminal ekspor bahan bakar Ust-Luga, menurut pejabat setempat.

Meski Rusia dan Ukraina kerap membicarakan perdamaian, perang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II tetap berlanjut di sepanjang garis depan sejauh 2.000 km, disertai gempuran rudal dan drone hingga jauh ke wilayah kedua negara.

Kementerian Pertahanan Rusia menyebut sedikitnya 95 drone Ukraina berhasil dicegat di lebih dari 12 wilayah pada 24 Agustus, bertepatan dengan hari peringatan kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet pada 1991.

PLTN Kursk, yang berjarak sekitar 60 km dari perbatasan Ukraina, melaporkan sistem pertahanan udara menembak jatuh sebuah drone yang kemudian meledak di dekat fasilitas tersebut tak lama setelah tengah malam. Ledakan itu merusak transformator cadangan dan memaksa pengurangan hingga 50% kapasitas pada reaktor nomor 3.

Pihak pembangkit menegaskan tingkat radiasi tetap normal dan tidak ada korban luka akibat kebakaran yang dipicu serangan drone. Dua reaktor lain beroperasi normal, sementara satu reaktor sedang dalam perawatan terjadwal.

Badan nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Tenaga Atom Internasional, mengatakan pihaknya mengetahui adanya laporan bahwa sebuah transformator di pembangkit listrik terbakar akibat aktivitas militer dan menekankan bahwa setiap fasilitas nuklir harus dilindungi setiap saat.

Seribu km di utara, di Teluk Finlandia, sedikitnya 10 pesawat tak berawak Ukraina ditembak jatuh di atas pelabuhan Ust-Luga di wilayah Leningrad utara Rusia, dengan puing-puing memicu kebakaran di terminal yang dioperasikan Novatek terminal ekspor bahan bakar Laut Baltik yang besar dan kompleks pemrosesan, kata gubernur daerah tersebut.

Kepulan Asap Hitam

Sementara itu, rekaman yang belum terkonfirmasi di kanal Telegram Rusia memperlihatkan sebuah drone menemukik menuju terminal bahan bakar, lalu meledak menimbulkan bola

api raksasa yang membumbung ke langit disertai kepulan asap hitam tebal yang menjulur ke cakrawala.

"Petugas pemadam kebakaran dan layanan darurat saat ini sedang berupaya memadamkan api," ujar Alexander Drozdenko, gubernur wilayah Leningrad, Rusia. Tidak ada korban luka, tambahnya.

Menurut Novatek (NVT.MM), membuka tab baru Kompleks Ust-Luga, yang dibuka pada tahun 2013, memproses kondensat gas menjadi nafta ringan dan berat, bahan bakar jet, bahan bakar minyak, dan gasoil, serta memungkinkan perusahaan mengirimkan produk minyak serta



Pemandangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kursk (KNPP) selama konflik Rusia-Ukraina, seperti yang terlihat dari kota Kurchatov di wilayah Kursk, Rusia, (19/3/2025). (Foto: Reuters)

kondensat gas ke pasar internasional.

Novatek sebagian besar memproduksi nafta untuk Asia, termasuk China, Singapura, Taiwan, dan Malaysia, serta bahan bakar jet dengan pengiriman ke Istanbul.

Rosaviatsia, otoritas penerbangan sipil Rusia, mengatakan penerbangan dihentikan selama berjam-jam di beberapa bandara Rusia semalam, termasuk di bandara Pulkovo di wilayah Leningrad.

Drone Ukraina juga menyerang sebuah perusahaan industri di kota

Syzran, Rusia selatan, kata gubernur wilayah Samara pada hari Minggu. Seorang anak terluka dalam serangan itu, menurut gubernur, yang tidak merinci secara pasti apa yang diserang.

Awal bulan ini, militer Ukraina mengatakan telah menyerang kilang minyak Syzran. Perusahaan milik Rosneft (ROSN.MM), membuka tab barukilang terpaksa menghentikan produksi dan pemasukan minyak mentah setelah serangan itu, sumber mengatakan kepada Reuters. (The Korea Herald, Hankyoreh, ist/nei)

SITUASI MILITER DAN DIPLOMATIK UKRAINA-RUSIA

Aspek	Perkembangan
1. Medan Perang	Rusia masih gencar menyerang dan merebut desa di Donetsk.
2. Upaya Diplomasi	Trump jadi mediator Putin-Zelenskyy, belum ada hasil.
3. Tuntutan Masing-Masing Pihak	Rusia minta Donbas dan tolak Ukraina masuk NATO, ditolak Ukraina.
4. Sikap Internasional	Tiongkok dukung mediasi, NATO terus beri bantuan militer

Zelensky: Ukraina Tak Akan Kalah

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan negaranya "tak akan menyerah" kepada Rusia, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz (Foto: france24)

meski pertempuran terus berlangsung dan diplomasi perdamaian memasuki tahap baru. Ia menyampaikan hal itu dalam pidato televisi pada peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina, Minggu (24/8/2025).

"Ukraina memang belum menang, tetapi sudah pasti tidak akan kalah," kata Zelensky, dikutip dari Radio Free Europe.

Ia menambahkan, meski sebagian wilayah Ukraina saat ini masih diduduki pasukan Rusia, tetap ada "satu Ukraina" dan "kita akan kembali bersama lagi sebagai satu keluarga."

Zelensky juga menyinggung

diplomasi yang penuh ketegangan dengan Rusia, di tengah seruan Donald Trump untuk mendorong pembicaraan damai.

"(Ukraina) tidak akan pernah lagi menerima penghinaan yang Rusia sebut sebagai 'kompromi,'" tegas dia.

"Kami membutuhkan perdamaian yang adil, di mana masa depan kami ditentukan oleh kami sendiri," sambung Zelensky.

Pidato tersebut disampaikan saat Ukraina merayakan Hari Kemerdekaan ke-34 sejak memisahkan diri dari Uni Soviet, di tengah realitas baru yang harus dihadapi baik di medan perang maupun arena diplomasi internasional.

Sehari sebelumnya, Rusia mengklaim pasukannya merebut dua

desa di wilayah Donetsk, sementara militer Ukraina menyebut berhasil merebut kembali sebuah pemukiman di tepi barat wilayah Dnipropetrovsk.

Moskow juga melaporkan kebakaran di sebuah pembangkit nuklir di wilayah Kursk barat telah berhasil dipadamkan setelah pertahanan udaranya menembak jatuh drone Ukraina.

Bulan ini, upaya diplomasi intensif juga digelar, termasuk pertemuan tingkat tinggi antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Meski kedua pemimpin menyebut pertemuan itu sukses, sejauh ini belum ada terobosan konkret ataupun rencana pertemuan lanjutan yang melibatkan Zelensky maupun pemimpin sekutu lainnya. (Radio Free Europe, ist/nei)

Kasus Sukabumi Bukti Bahaya Infeksi Cacing Bagi Manusia

Kasus tragis menimpa seorang balita berinisial R (3) asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal akibat infeksi cacing parah kini menyita perhatian publik. Tubuh korban dipenuhi cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), bahkan sempat beredar video yang menunjukkan cacing keluar dari tubuhnya dan menjadi viral di media sosial. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa cacingan bukanlah masalah sepele, melainkan penyakit serius yang masih mengancam anak-anak Indonesia, bahkan orang dewasa.

Meski kerap dianggap sebagai “penyakit lama,” kenyataannya tingkat infeksi cacing parasit masih cukup tinggi, terutama di daerah dengan kondisi sanitasi yang kurang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana cacing bisa hidup di dalam tubuh

manusia, dan sejauh mana bahaya yang ditimbulkannya?

Cacing Bisa Bertahan di Tubuh Manusia

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), infeksi cacing usus terjadi ketika telur atau larva tertelan melalui makanan, air, atau tangan yang terkontaminasi. Telur tersebut menetas di usus, kemudian larva bermigrasi melalui aliran darah menuju paru-paru, sebelum akhirnya kembali ke usus untuk tumbuh menjadi cacing dewasa. Di sinilah mereka bertahan hidup, menyerap nutrisi dari tubuh manusia, dan bahkan mampu bereproduksi hingga menghasilkan ratusan telur setiap harinya.

Mayo Clinic mencatat bahwa cacing gelang dewasa bisa bertahan hidup selama 1-2 tahun di dalam usus. Panjangnya bisa mencapai 35 cm, dan pada infeksi berat, jumlah cacing bisa ratusan ekor, seperti kasus tragis di Sukabumi. Kondisi ini

dapat menyebabkan gangguan gizi, penyumbatan usus, hingga komplikasi pada hati atau saluran empedu. Ada beberapa jenis cacing yang paling sering menginfeksi manusia:

Cacing Gelang

Ini adalah parasit besar berwarna putih atau merah muda yang panjangnya bisa mencapai panjang lebih dari 30 sentimeter. Mereka menetap di usus halus dan sering menyebar melalui makanan yang terkontaminasi. Bila masuk dan menginfeksi tubuh manusia, parasit ini bisa berkembang biak dan bertambah banyak.

Dibanding orang dewasa, anak-anak lebih rentan terkena infeksi cacing gelang. Terutama jika anak memiliki beberapa kebiasaan yang bisa meningkatkan risikonya.

Cacing Tambang

Berbeda dengan jenis lainnya, parasit ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit ketika seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah atau kotoran yang mengandung larva.

Setelah masuk ke tubuh, parasit ini akan menempel ke dinding usus dengan “pengait”. Panjangnya biasanya kurang dari 1,27 cm. Parasit ini bisa menyebabkan anemia dan masalah kesehatan serius lainnya. Untuk mencegahnya, pastikan kamu selalu memakai alas kaki saat pergi ke luar rumah. Pasalnya, tanah yang kamu injak bisa jadi merupakan salah satu habitat parasit ini untuk berkembang biak.

Cacing Cambuk

Ini adalah jenis parasit yang menginfeksi usus besar manusia. Parasit ini memiliki bagian kepala bertekstur halus dan bagian ekornya menebal mirip seperti cambuk. Itulah mengapa parasit ini para ahli kenal

sebagai cacing cambuk. Seseorang bisa cacingan jenis ini bila ia tidak sengaja menelan telurnya. Misalnya bila tangan atau jari kamu terkontaminasi kotoran dan kamu memasukannya ke dalam mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu.

Mengonsumsi sayuran atau buah yang tidak kamu cuci dan kamu masak dengan baik juga bisa meningkatkan risiko kamu terinfeksi cacing cambuk. Parasit ini bisa mengakibatkan penyakit trichuriasis.

Cacing Pita

Ini adalah parasit berbentuk panjang dan pipih yang panjangnya bisa lebih dari 20 kaki. Parasit ini bisa menginfeksi manusia melalui air yang terkontaminasi telur atau larva parasit ini. Mengonsumsi daging mentah atau setengah matang juga bisa jadi penyebab kondisi ini. Hewan ini bisa menginfeksi otak manusia dan menyebabkan kondisi serius seperti sistaerokosis. Jangan sepelekan penyakit cacingan, karena bisa menimbulkan berbagai gejala yang tidak nyaman.

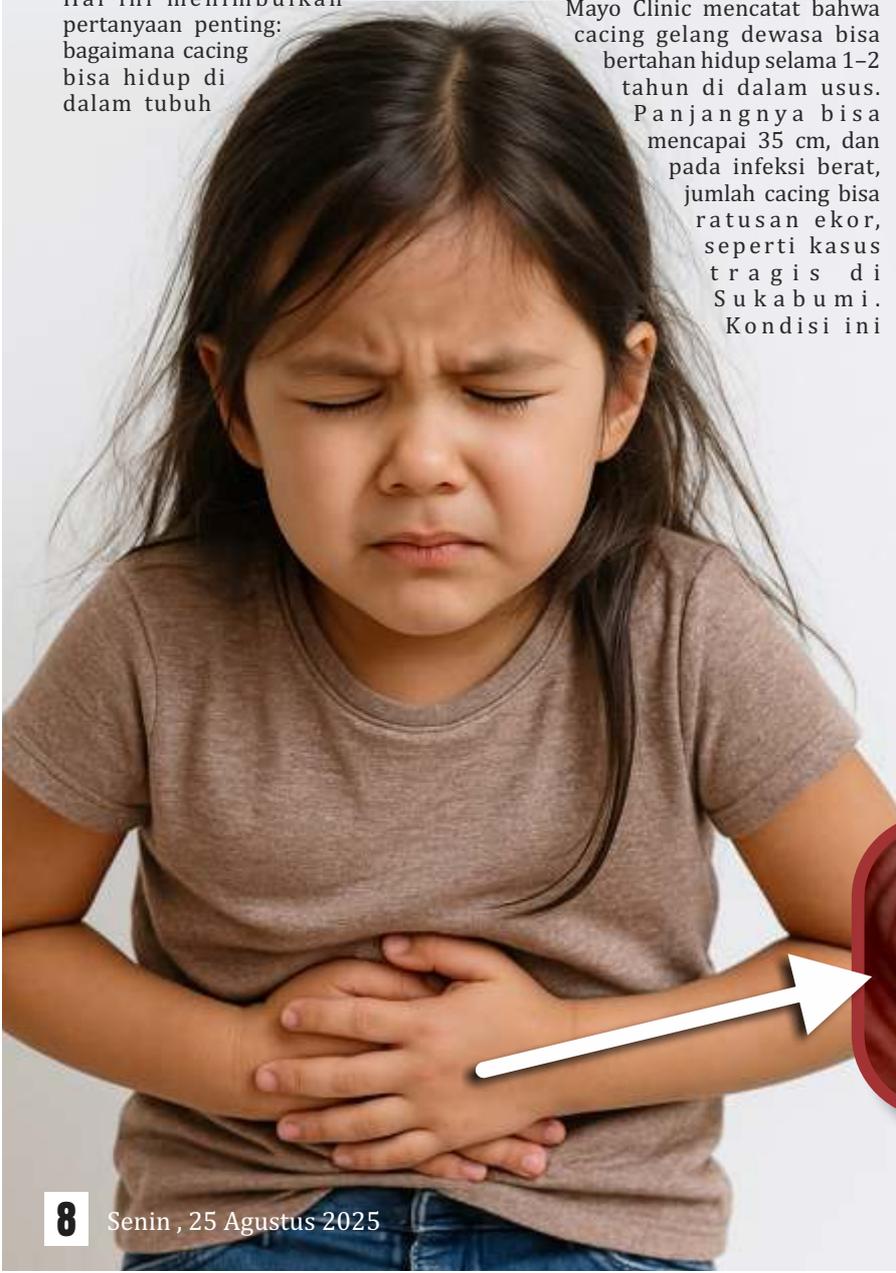
Cacing Kremi

Ini adalah salah satu jenis yang paling umum menyerang manusia. Parasit ini berukuran kecil, kira-kira setengah inci panjangnya, dan biasanya ditemukan di usus besar.

Cara penularannya bisa terjadi ketika seseorang secara tidak sadar menyentuh telur-telur cacing kremi dan melennya. Karena memiliki ukuran yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat, telur parasit ini mudah terbang dan terhirup atau termakan manusia.

Gejala dan Dampak Kesehatan

Infeksi ringan sering kali tidak menimbulkan gejala. Namun, pada kasus yang lebih berat dapat muncul keluhan berupa nyeri perut, mual, muntah, atau diare. Kondisi ini juga bisa disertai kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, hingga malnutrisi. Jika larva bermigrasi ke paru-paru, penderita dapat mengalami batuk atau sesak napas. Pada infeksi yang parah, komplikasi serius seperti sumbatan usus, perforasi, bahkan gangguan pada organ lain dapat terjadi. (nei,ist/dya)



KERUNTUHAN BIOSFER ANCAM 60% DARATAN BUMI



Sebuah penelitian terbaru dari Potsdam Institute for Climate Impact Research di Jerman bersama BOKU University di Wina mengungkapkan hasil yang mengkhawatirkan terkait kondisi biosfer Bumi.

Biosfer merupakan lapisan Bumi yang menjadi ruang hidup bagi seluruh makhluk. Di dalamnya mencakup wilayah daratan, perairan, hingga udara, serta segala bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka berada.

Secara sederhana, biosfer dapat diartikan sebagai lapisan kehidupan di Bumi. Istilah "bios" berarti hidup, dan "sphere" berarti lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan yang dihuni oleh makhluk hidup dan tempat mereka berinteraksi.

Riset yang dipublikasikan di jurnal One Earth ini menyoroti konsep "integritas biosfer fungsional", yakni kemampuan dunia tumbuhan menjaga proses vital seperti siklus karbon, air, dan nitrogen.

Hasilnya mengejutkan, 60 persen daratan dunia kini berada dalam kondisi berisiko, dengan sebagian besar masuk kategori berisiko tinggi. Para peneliti menggunakan berbagai metrik untuk menilai bagaimana aktivitas manusia memengaruhi biosfer global, dan mengaitkannya dengan isu besar lain seperti hilangnya keanekaragaman hayati serta krisis iklim.

Tekanan pada Biosfer

Penulis utama studi, Fabian Stenzel, mengatakan peradaban manusia sangat bergantung pada

biosfer, berguna untuk pangan, bahan baku, dan perlindungan iklim. Oleh karena itu, penting untuk kita mengukur beban yang ditimbulkan manusia terhadap biosfer.

Temuan studi menunjukkan sebagian besar daratan Bumi telah melewati ambang kritis, tidak lagi berada di zona aman untuk menjaga stabilitas planet. Eksploitasi besar-besaran, terutama dari sektor pertanian dan industri, bukan hanya mengancam ekosistem alami, tapi juga proses vital yang menopang kehidupan di Bumi.

Peta terbaru yang dibuat tim peneliti menggambarkan kondisi Bumi yang suram. Saat ini, 60 persen daratan global berada di luar zona aman biosfer. Dari angka itu, 38 persen daratan masuk

kategori risiko tinggi, dengan wilayah di Eropa, Asia, dan Amerika Utara paling rentan.

Yang mengejutkan, titik kritis ini sebenarnya sudah tercapai jauh sebelum dampak perubahan iklim terlihat luas.

"Kerangka ini menempatkan aliran energi dari fotosintesis vegetasi dunia sebagai pusat dari proses yang ikut mengatur stabilitas planet," ujar Wolfgang Lucht, koordinator studi sebagaimana dikutip Newsweek.

Sayangnya, energi vital dari tumbuhan yang menopang kehidupan di Bumi itu semakin banyak dibajak oleh aktivitas manusia, sehingga mengganggu siklus alami biosfer. Inilah salah satu penyebab utama risiko besar yang kini dihadapi ekosistem global.

Studi ini juga memberikan perspektif historis, menelusuri kondisi biosfer hingga abad ke-17. Dengan melacak perubahan iklim dan penggunaan lahan sejak tahun 1600, peneliti menemukan tekanan pada biosfer sudah meningkat sejak awal industrialisasi.

Pada 1900, hampir 37 persen daratan sudah berada di luar zona aman, dengan 14 persen masuk kondisi risiko tinggi. Artinya, krisis hari ini bukan hanya akibat perubahan iklim modern, melainkan akumulasi dari ratusan tahun konversi lahan dan eksploitasi sumber daya. Ekspansi pertanian dan industrialisasi telah mendorong Bumi semakin dekat ke ambang keruntuhan ekologi. (nei,ist/dya)



Makna Mendalam di Balik Buket Bunga Pernikahan

Buket bunga merupakan bagian penting yang menyempurnakan momen istimewa di hari pernikahan. Tidak hanya memperindah penampilan mempelai perempuan, setiap rangkaian bunga juga mengandung makna mendalam yang selaras dengan kebahagiaan acara tersebut.

Jika kamu masih ragu menentukan pilihan bunga untuk buket pernikahan, tidak perlu khawatir. Ada berbagai jenis bunga yang bukan hanya menawan secara visual, tetapi juga menyimpan makna istimewa untuk melengkapi hari bahagiamu.

Di dunia ini terdapat begitu banyak jenis bunga yang menawan. Namun, ada beberapa di antaranya yang memiliki makna istimewa dan sangat pas untuk melambangkan momen berharga dalam pernikahan.

Bunga Calla Lilly

Bunga ini sempat menjadi trending topik saat digunakan oleh Luna Maya saat resepsi pernikahannya. Kala itu, perempuan berusia 41 tahun itu memilih varietas berwarna hitam yang melambangkan kekuatan dan ketahanan. Dua hal penting dalam membina rumah tangga. Dikutip dari Brides, untuk varian berwarna putih melambangkan pengabdian, kesucian, kemurnian cinta pengantin.

Bunga Peony

Selanjutnya adalah jenis peony, bunga yang terkenal karena keindahannya dengan kelopak yang mekar lebat dan menawan. Bentuknya yang anggun menjadikan peony sering dijadikan pilihan dalam rangkaian bunga maupun dekorasi,

karena memberikan sentuhan estetik yang kuat.

Selain pesonanya, peony juga sarat dengan makna simbolis. Bunga ini dipercaya melambangkan kemakmuran, keberuntungan, serta cinta yang tulus, sehingga sangat selaras dengan momen spesial pernikahan yang penuh harapan akan kehidupan baru yang bahagia dan harmonis.

Bunga Anggrek

Bunga anggrek dikenal bukan hanya karena keindahannya yang memukau, tetapi juga karena wangi khasnya yang kuat dan menawan. Bentuknya yang unik dan elegan membuat anggrek sering menjadi pilihan utama dalam berbagai rangkaian bunga. Khususnya pada buket yang menjuntai ke bawah, kehadiran anggrek mampu memberikan sentuhan anggun sekaligus mewah pada setiap acara.

Secara simbolis, bunga anggrek memiliki makna yang mendalam. Ia sering dipandang sebagai lambang cinta yang tulus dan mendalam, sekaligus melambangkan pertumbuhan dalam kehidupan. Tak heran, anggrek kerap dipilih sebagai bunga istimewa untuk menandai momen berharga penuh keindahan dan harapan.

Bunga Tulip

Meski masih jarang digunakan, bunga tulip sebenarnya bisa menjadi pilihan menarik untuk buket pernikahan. Bentuknya yang sederhana namun elegan mampu memberikan kesan anggun dan menawan, menjadikannya berbeda dari pilihan bunga yang umumnya digunakan pada momen spesial tersebut. Secara makna, tulip melambangkan kesempurnaan dan cinta yang

mendalam. Bunga ini juga sering diartikan sebagai simbol kehidupan baru, yang sangat selaras dengan makna pernikahan sebagai awal perjalanan bersama menuju masa depan penuh harapan dan kebahagiaan.

Bunga Mawar

Bunga mawar sepertinya sudah menjadi favorit banyak orang, mungkin kamu salah satunya. Mawar dikenal luas sebagai simbol cinta dan keromantisan, sehingga tak heran jika bunga ini sering hadir dalam berbagai momen spesial, termasuk pernikahan. Keanggunan bentuknya dan pesona kelopaknya membuat mawar selalu berhasil mencuri perhatian.

Baik mawar merah maupun putih, keduanya sama-sama cocok untuk digunakan pada hari bahagia. Mawar merah melambangkan cinta yang penuh gairah, sementara mawar putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Kombinasi keindahan visual dan makna mendalam inilah yang menjadikan mawar pilihan istimewa untuk mempercantik momen berharga.

Bunga Dahlia

Bunga dahlia memiliki pesona tersendiri dengan kelopaknya yang indah dan berwarna-warni, mulai dari putih, kuning, oranye, merah, hingga ungu. Keanekaragaman warnanya menjadikan dahlia sebagai bunga yang menarik untuk berbagai dekorasi maupun rangkaian bunga, termasuk buket pernikahan yang ingin tampil penuh warna dan berkesan.

Selain keindahannya, dahlia juga sarat makna simbolis. Bunga ini melambangkan kekuatan batin dan komitmen, sekaligus

mencerminkan kebaikan, keanggunan, serta rasa syukur. Kamu pun bisa memadukan dahlia dengan bunga lain untuk menciptakan rangkaian yang lebih kaya, harmonis, dan penuh arti pada momen spesial.

Bunga Baby's Breath

Bunga dengan kelopak kecil ini cukup populer di kalangan pengantin. Baby's breath melambangkan cinta yang abadi, kemurnian, kepolosan, dan komitmen yang tulus. Ladies yang memilih bunga ini bisa mengkombinasikannya dengan berbagai jenis bunga lain untuk menciptakan rangkaian yang cantik dan harmonis.

Bunga Sweet Pea

Kamu mungkin masih asing dengan bunga bernama sweet pea, tapi bunga ini tak kalah cantik dibandingkan varian lainnya. Sweet pea melambangkan kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan, sehingga menjadi pilihan yang sempurna untuk menghadirkan suasana ceria di hari pernikahan.

Bunga Matahari

Kalau kamu menyukai warna yang cerah, bunga matahari bisa menjadi pilihan yang tepat untuk buket di hari pernikahanmu nanti. Bunga ini melambangkan kesetiaan dan cinta yang abadi karena sifatnya yang selalu mengikuti arah cahaya matahari. Keindahan dan maknanya yang mendalam juga mampu memberikan sentuhan hangat.

Selain itu, kombinasi bunga matahari dengan bunga lain seperti mawar putih atau lily juga bisa menciptakan tampilan buket yang semakin anggun dan elegan. (nei,ist/dya)



Dimsum Bond (dari Hal 1) ...

Saat ini, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS dan ketidakpastian pasar obligasi internasional mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, beralih atau melakukan diversifikasi pembiayaan. Pemerintah Indonesia berencana untuk menerbitkan dimsum bond pada kuartal IV 2025.

Meski begitu, pemerintah belum mau mengungkapkan tanggal detail rencana penerbitan Dimsum Bond.), Plt. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Novi Puspita Wardani hanya memastikan bahwa penerbitan Dim Sum Bond nantinya akan tergantung kondisi pasar obligasi dan perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN.

Novi juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menerapkan strategi pembiayaan yang hati-hati, fleksibel, dan terukur, dengan mempertimbangkan pemilihan waktu penerbitan, jenis instrumen, serta keseimbangan komposisi mata uang.

Penerbitan dimsum bond sendiri setelah sukses dengan penerbitan samurai bond, euro bond dan kangaroo bond. Plt. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Novi Puspita Wardani mengatakan bahwa setelah keberhasilan Kangaroo Bond, pipeline berikutnya adalah penerbitan (perdana) dimsum bond, untuk memperluas basis investor di Asia sekaligus memperkuat diversifikasi portofolio pembiayaan APBN.

Transaksi ini, lanjut Novi, menjadi langkah penting untuk memperluas basis investor, mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN, sekaligus mempererat kerja sama bidang keuangan Indonesia-Australia.

Penerbitan perdana Kangaroo Bonds mendapat sambutan yang sangat positif dari investor global. Permintaan investor mencapai AUD 8 miliar atau 10 kali lebih besar dari total nominal setelah sebesar AUD 800 juta.

Sekitar sepertiga investor pembeli Kangaroo Bond berasal dari investor domestik Australia, atau setara 34% untuk seri tenor 5 tahun dan 33% untuk tenor 10 tahun. Sisanya berasal dari Asia untuk tenor 5 tahun dengan porsi 43% dan tenor 10 tahun 53%, serta Eropa, Timur Tengah, dan Afrika maupun Inggris (EMEA/UK) porsinya masing 23% dan 14%.

"Sebuah capaian yang menunjukkan meningkatnya minat dan kepercayaan pasar Australia terhadap fundamental ekonomi Indonesia," ujar Novi.

Dengan besarnya minat investor

terhadap Kangaroo Bond RI membuat Pemerintah berhasil menetapkan tingkat imbal hasil (yield) yang kompetitif, yakni sebesar 4,427% untuk tenor 5 tahun dan 5,380% untuk tenor 10 tahun.

Transaksi perdana ini dilakukan melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN). Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2025. Obligasi yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB oleh Standard & Poor's, dan BBB oleh Fitch.

Sementara itu, rencana penerbitan dimsum bond dilakukan sebagai upaya diversifikasi pembiayaan untuk mengurangi cost of fund, memperluas basis investor dan mengelola portofolio secara optimal. Lantas, bagaimana diversifikasi ini dapat berdampak baik untuk keuangan negara.

Dilansir dari kumparan, di antara dampak yang bisa ditimbulkan adalah mengurangi cost of fund, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah (untuk obligasi negara) kepada pemberi dana atau investor yang membeli obligasi negara.

Berdasarkan grafik MacroMicro (China/US 10Y Bond Yield Spread vs. USD/CNH), sejak 2012, yield obligasi pemerintah Tiongkok tenor 10 tahun umumnya berada di atas yield obligasi AS, sehingga spread positif. Kondisi ini berarti obligasi Tiongkok menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan AS, yang biasanya membuat investor asing lebih tertarik membeli obligasi berdenominasi renminbi. Namun, sejak sekitar 2022, spread tersebut menurun tajam bahkan masuk wilayah negatif. Artinya, yield obligasi AS lebih tinggi daripada Tiongkok.

Penurunan spread ini bertepatan dengan pelemahan CNH terhadap USD, yang menandakan arus modal cenderung keluar dari Tiongkok menuju AS. Dalam penerbitan utang internasional, ketika spread rendah atau negatif, pemerintah Tiongkok (atau pihak yang menerbitkan obligasi dalam CNH seperti dimsum bond) berpotensi menawarkan kupon yang relatif lebih rendah dibanding instrumen USD, sehingga cost of fund menjadi lebih murah.

Kalau pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi dalam CNH, pada saat membayar bunga atau pokok, nilai CNH relatif lebih murah kalau diukur dalam USD atau rupiah (selama tren pelemahan CNH berlanjut). Jadi bukan hanya kupon rendah, kursnya pun tidak memberatkan selama CNH lemah. Namun, hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena jika CNH menguat signifikan, maka beban pembayarannya justru dapat

meningkat. Oleh karena itu, dalam penerbitan dimsum bond diperlukan pertimbangan yang matang.

Kemudian akan memperluas basis investor, artinya menambah variasi kelompok pembeli surat utang negara, baik dari sisi lokasi geografis, jenis institusi, maupun mata uang yang digunakan, sehingga permintaan terhadap surat utang tidak bergantung pada satu segmen pasar saja.

Penerbitan dimsum bond membuka peluang untuk menjangkau ekosistem investor yang berbeda, seperti investor yang aktif di Hongkong, Macau, Singapura hingga negara-negara yang menyimpan sebagian cadangannya dalam mata uangnya.

"Tingginya minat investor global termasuk investor domestik Australia ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Bagi Indonesia, dampaknya bukan sekadar menambah jumlah pembeli, tetapi juga memperkuat stabilitas pembiayaan. Ketika pasar obligasi USD sedang tertekan akibat kenaikan suku bunga The Fed, investor CNH dapat menjadi penyeimbang permintaan. Dengan begitu, pemerintah tetap memiliki ruang untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya yang kompetitif.

Pada saat yang sama, langkah ini memperkuat reputasi Indonesia di pasar internasional sebagai penerbit yang mampu mengakses berbagai pusat keuangan dunia. Hal ini menjadi sinyal positif yang kerap diperhatikan oleh lembaga pemeringkat dan investor global.

Kemudian juga menata komposisi seluruh instrumen utang harus dilakukan dengan optimal, baik dalam jenis kupon, pasar penerbitan, profil jatuh tempo, maupun mata uang. Saat ini, utang pemerintah Indonesia didominasi oleh USD, JPY, dan EUR. Menambahkan CNH berarti diversifikasi mata uang, dapat membantu mengurangi risiko jika satu mata uang melemah atau suku bunganya naik tajam.

Jika hanya fokus pada satu mata uang misal USD, ketika USD menguat atau suku bunga melonjak, maka akan menyebabkan biaya utang bertambah dan memperberat kewajiban membayarnya. Tetapi, ketika terdapat diversifikasi lain, misalnya CNH, maka guncangan di satu mata uang bisa ditahan oleh yang lain.

Ketika yield CNH sedang lebih rendah dibanding USD, menerbitkan dimsum bond menurunkan cost of fund rata-rata portofolio. Pasar CNH kadang lebih "ramah" pada tenor tertentu (misalnya 3-5 tahun). Pemerintah bisa menyusun tangga jatuh tempo (maturity ladder) yang

rapi (tidak menumpuk di satu tahun) sehingga risiko refinancing berkurang. Dengan begitu, portofolio utang tetap terjaga.

Penerbitan dimsum bond dinilai sebagai langkah strategis bagi Pemerintah Indonesia dalam memperkuat fondasi pembiayaan negara. Melalui instrumen ini, pemerintah tidak hanya berpotensi memperoleh biaya dana yang lebih rendah, tetapi juga mampu memperluas basis investor dengan menjangkau pasar yuan lepas pantai dan institusi keuangan Asia. Selain itu, diversifikasi mata uang melalui dimsum bond dapat membantu mengelola portofolio utang secara lebih optimal.

Meskipun demikian, sejumlah risiko tetap harus diperhatikan, seperti risiko nilai tukar apabila CNH menguat signifikan terhadap rupiah, risiko suku bunga global yang dapat memengaruhi tingkat kupon, serta risiko pembiayaan kembali jika jatuh tempo tidak diatur dengan baik.

Oleh karena itu, penerbitan dimsum bond sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan yang terukur, dengan perhitungan matang agar manfaatnya bagi stabilitas fiskal dan kredibilitas pasar dapat lebih besar dibanding potensi risikonya.

Permintaan Kangaroo Bond Laris Manis

Permintaan terhadap Kangaroo Bond, surat utang negara (SUN) berdenominasi dolar Australia perdana RI, menerima penawaran masuk mencapai 10 kali lipat dari target (oversubscribe).

"Tingginya minat investor global termasuk investor domestik Australia ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/8/2025) lalu.

Pemerintah mengumumkan secara resmi pembukaan penawaran perdana penerbitan Kangaroo Bond pada tanggal 7 Agustus 2025 yang terdiri dari dua seri, yakni RIAUD0830 dan RIAUD0835 dengan nilai penerbitan masing-masing 500 juta dolar Australia (Rp5,3 triliun) dan 300 juta dolar Australia (Rp3,18 triliun).

Penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia, hingga mencapai total orderbook sekitar 8 miliar dolar Australia (Rp84,8 triliun).

Tingginya permintaan tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance).. (han,ant,ist/lut)



DPRD SURABAYA APRESIASI PROGRAM KAMPUNG PANCASILA BAHTIYAR RIFAI: HARUS BERI SOLUSI NYATA BAGI WARGA

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meluncurkan program Kampung Pancasila di 1.360 titik yang tersebar di 153 kelurahan. Program ini dibentuk melalui Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila yang bertujuan membumikan nilai-nilai Pancasila sekaligus mengurai berbagai persoalan di tingkat Rukun Warga (RW).

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, program ini merupakan kelanjutan dari Kampung Madani yang terbukti memberi dampak positif bagi warga.

"Kampung Pancasila ini program bagus. Saya berharap jangan hanya menjadi slogan, tetapi juga ada penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul di lapangan" kata Bahtiyar ketika dikutip, Minggu (24/8/2025).

Dia menekankan aksi nyata sehingga bisa memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi warga.

Ia menyebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menjalani pelatihan Training of Trainer (ToT). Petugas juga turun langsung ke kampung-kampung untuk menyukseskan program. Bidang yang disentuh pun beragam, mulai sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.

"Ini langkah bagus untuk masyarakat. Tetapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana masalah yang teridentifikasi dari program itu bisa diatasi dengan baik. Jangan sampai apa yang sudah dihimpun, dikumpulkan saja, tidak



Bank Sampah dan menjahit jadi andalan di Kampung Pancasila Rangkah. (Dok)

teralisasi sama sekali. Itu tidak boleh terjadi," tuturnya.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menilai, setiap daerah memiliki potensi dan masalah berbeda. Misalnya, di satu kelurahan cocok dikembangkan urban farming, sementara di kelurahan lain belum tentu kegiatan itu cocok. Bisa jadi ada persoalan nelayan yang perlu perhatian khusus.

Oleh karena itu, menurutnya Pemkot harus mampu mengintervensi program sesuai kondisi dan kebutuhan warga tiap-tiap wilayah.

Ingatkan Perkuat Kolaborasi

Di sisi lain dia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Apabila program-program itu belum bisa diselesaikan di tingkat Pemkot, maka saya kira selanjutnya koordinasi dengan provinsi dan pusat

menjadi langkah penting selanjutnya. Pasalnya, ada program yang mungkin harus diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Jadi, harus ada kolaborasi yang jelas dan kuat agar cepat dieksekusi," tambahnya.

Tak hanya itu, Bahtiyar juga menilai keberadaan Kampung Pancasila bisa menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Surabaya.

"Mahasiswa KKN bisa turun langsung melihat dan menilai program yang ada di Pemkot Surabaya. Ini bisa jadi bahan tugas, bahkan skripsi. Karena program Kampung Pancasila ini terobosan baru yang belum ada di kabupaten atau kota lain di Jawa Timur," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kampung Pancasila' digagas oleh Pemkot Surabaya bersama Forkopimda sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial secara tuntas.

Kampung Pancasila merupakan gerakan terpadu yang bertujuan mengatasi berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga stunting.

Dalam setiap Rukun Warga (RW) yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila, ada empat pilar utama yang menjadi fokus utama, antara lain Pilar Lingkungan yang membiasakan warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama dalam hal pemilahan sampah. Pilar Ekonomi, mendorong ekonomi kerakyatan

dengan pemberdayaan pemuda melalui pelatihan dan pembentukan usaha mandiri.

Selanjutnya, Pilar Kemasyarakatan, untuk mengidentifikasi masalah sosial di setiap RW, seperti jumlah anak putus sekolah atau kasus stunting, untuk segera dicarikan solusinya. Dan, Pilar Sosial Budaya yang menekankan pentingnya nilai-nilai kegotongroyongan, gotong royong, dan kepedulian sosial, yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kebudayaan.

Satgas Kampung Pancasila memiliki struktur hingga ke tingkat RW. Ketua RW secara ex officio menjadi Ketua Satgas yang dibantu empat kelompok kerja (pokja) di bidang lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, dan ekonomi. Setiap pokja didampingi oleh perangkat daerah sebagai koordinator program.(adv)



Kampung Pancasila ini program bagus. Saya berharap jangan hanya menjadi slogan, tetapi juga ada penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul di lapangan."

BAHTIYAR RIFAI

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

